

CATATAN ATAS HASIL KTT G20 BALI DAN PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA SELAMA TAHUN 2022

Dadang Trisasongko
Anggota Dewan Pengawas PWYP Indonesia
Sekretaris Dewan Pembina ICEL

Countering
Corruption in
Energy Transition

Open Contracting

Beneficial
Ownership
Transparency

Transparency and
Integrity of
Corporations

Combating Money Laundering and
Recovery of Stolen Assets



A.C.W.G

Our Priority Issues

Our Key messages

ACWG



1. Ensure accountability through improved target setting and reporting.
(e.g. adopting peer review mechanism as implemented in UNCAC review mechanism)
2. Build a culture of learning among member countries to identify both successes and failures.
3. Prioritize greater engagement with civil society through ongoing consultations with CSOs.
4. Commit to ongoing efforts to ensure citizens and CSOs can participate in monitoring and oversight of the delivery of G20 anti corruption commitments.



G20 BALI LEADERS' DECLARATION
Bali, Indonesia, 15-16 November 2022



Poin-poin Deklarasi Para Pemimpin G20 yang relevan dengan isu anti korupsi (1)

- Penegasan komitmen untuk mengefektifkan implementasi sejumlah konvensi internasional terkait anti korupsi, terutama UNCAC dan OECD Anti Bribery Convention.
- Pentingnya akuntabilitas dan transparansi di sektor publik maupun sektor swasta.
- Pentingnya peran audit
- Pentingnya partisipasi publik dan pendidikan anti korupsi
- Pentingnya fokus pada penyuapan, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan (termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.)
- Pentingnya terus menolak keberadaan safe haven bagi para koruptor dan asetnya.
- Pentingnya partisipasi akademisi, masyarakat sipil, swasta dan media dalam menguatkan budaya integritas

(2)

- Pentingnya komunitas internasional untuk meningkatkan upaya untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi secara efektif. G20 juga berkomitmen untuk memberikan prioritas strategis dari Financial Action Task Force (FATF) dan FATF Style Regional Bodies (FSRBs).
- G20 menyambut inisiatif FATF untuk mempromosikan implementasi standar internasional pada aset virtual, khususnya "travel regulation", dan transparansi kepemilikan manfaat, dan mengakui peran mereka dalam perang melawan korupsi sistemik dan kejahatan lingkungan, yang berdampak serius pada ekonomi dan masyarakat.

(3)

- G20 mendukung pekerjaan FATF yang sedang berlangsung untuk meningkatkan upaya global untuk menyita hasil kejahatan dan mengembalikan dana kepada para korban dan negara sejalan dengan kerangka kerja domestik.

G20 Anti-Corruption Action Plan 2022-2024

public and
private sector
integrity and
transparency

bribery

international
cooperation

asset
recovery

beneficial
ownership
transparency

capacity-
building.

vulnerable
sectors



Fast-tracking United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Implementation

Fostering CSOs involvement in eradicating and tackling corruption has been stated in Article 13 (Article 13) of UNCAC. CSOs and the government are working together on the “Fast-tracking UN Convention against Corruption (UNCAC) Implementation”

LEADING BY EXAMPLE :

Para pemimpin negara-negara G20 masih berhutang : Bukti Nyata Pemberantasan Korupsi yang Serius dan Progresif.

Corruption Perception Index G20 Members

	G 20 Member	2016	2021
1	China	40	45
2	South Africa	45	44
3	India	40	40
4	Brazil	40	38
5	Argentina	36	38
6	Indonesia	37	38
7	Turkey	41	38
8	Mexico	30	31
9	Russia	29	29

Source: CPI, Transparency International

Beberapa perkembangan yang terkait dengan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi selama tahun 2022

1. Dampak revisi UU KPK di tahun 2019 dirasakan hingga hari ini, yaitu :
 - Terus merosotnya integritas pimpinan KPK yang mengancam integritas lembaga;
 - Lemahnya independensi institusi KPK telah mengakibatkan politisasi institusi KPK dan menyeret KPK masuk ke dalam kontestasi politik elektoral dan dijadikan alat politik kekuasaan.
 - Kedua kelemahan itu telah melemahkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi

- Pemerintah dan DPR gagal mewujudkan komitmennya untuk membangun kerangka hukum anti korupsi yang lebih progresif dengan: i) mengadopsi sejumlah rekomendasi UNCAC, terutama terkait jenis-jenis pemidanaan, ii) mempertahankan badan anti korupsi yang independen, iii) membentuk Undang Undang Pemulihan Aset, iv) menghormati dan melindungi partisipasi masyarakat.